KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masyarakat Senang Dapat Bantuan : Ngasih BLT Oke, Berantas Mafia Migor Tetap Wajib
Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Masyarakat Senang Dapat Bantuan

Ngasih BLT Oke, Beranta Mafia Migor Tetap Wajib

Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (migor) ke masyarakat selama tiga bulan, mulai April hingga Juni tahun ini. Bantuan ini mestinya diikuti dengan langkah konkret untuk menyelesaikan krisis minyak goreng.

ANGGOTA Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, BLT memang sangat dibutuhkan rakyat di tengah mahalnya harga migor. Namun, mengendalikan dan menertibkan praktik mafia dalam tata niaga migor jauh lebih penting.

"Dilihat dari permukaan, Pemerintah seakan memihak pada rakyat dengan pemberian BLT. Namun, kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan Pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng," ujar Amin dalam keterangannya, kemarin.

Politikus PKS ini bilang, dana BLT Minyak Goreng diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19.

Dana ini sedianya untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan esktrem.

Amin menyayangkan, dana yang seharusnya untuk penanggulangan kemiskinan malah tersedot untuk BLT minyak goreng. Padahal, saat ini rakyat juga dihadapkan pada kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya.

BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu akan diberikan kepada 20,5 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos dan 2,5 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) gorengan. Untuk itu dibutuhkan dana sebesar Rp 6,9 triliun.

"Padahal, jika presiden tegas menjalankan undang-undang dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng, negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng," jelas Amin.

Selain subsidi minyak goreng, lanjutnya, Pemerintah harus tetap mempertahankan subsidi listrik, LPG, solar dan bensin Pertalite. Subsidi tersebut sebagai konsekuensi tak terhindarkan agar ekonomi rakyat kecil tidak makin terpuruk setelah dihantam pandemi Covid-19.

Untuk menyelesaikan krisis minyak goreng, dia meminta Pemerintah melaksanakan rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menyarankan agar Pemerintah memperkuat pengendalian terhadap stok CPO (Crude Palm Oil) sebagai tindak lanjut kebijakan *Domestic Market Obligation-Domestic Price Obligation* (DMO-DPO).

KPPU, ujar Amin, juga menyarankan pelacakan dan pengecekan stok di tingkat produsen dan distributor melalui sistem informasi pasar terbuka.

"Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini harus dikembangkan Pemerintah melalui sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH)," terang Amin.

Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, KPPU merekomendasikan Pemerintah menyediakan insentif untuk produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan sawit.

Hal itu terutama dilakukan di wilayah yang tidak terdapat produsen minyak goreng. Sehingga pasokan minyak goreng di daerah tersebut tetap terjaga.

"Ini aneh, ada rekomendasi yang bagus dan pemerintah mempunyai semua instrumen untuk mengatur dan mengendalikan tata niaga minyak goreng agar tidak dikuasai kartel, tapi (Pemerintah) tidak direspons," kritiknya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta aparat Kepolisian dan TNI melakukan pengawasan maksimal terhadap penyaluran BLT minyak goreng agar tepat sasaran.

"Kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh Kepolisian maupun TNI sangat cukup," ujar Sahroni dalam keteranganya, kemarin. ■ TIF

PERPUSTAKAAN DPR-RI